



KEPEMIMPINAN KIAI POLITIKUS DALAM TRANSFORMASI KECERDASAN EMOSIONAL SANTRI DI PONPES NURUL ULUM PEMALANG

Rasimin, & Imam Subqi

Dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga
rasimin75@gmail.com, imamsubqi@iainsalatiga.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the leadership patterns of kiai politicians in increasing the emotional intelligence of students, and want to know the reality of the leadership pattern of politicians in improving the emotional intelligence of students in the Nurul Ulum Pemalang Islamic boarding school. This research uses naturalistic qualitative research. The results showed that: (1) As a leader of a boarding school and at the same time as a figure of politician, the Kiai must understand who he is, how to carry out his roles, duties and responsibilities well, and fulfill various criteria that show his charisma as a leader. This is characterized by the characteristics of transformational, responsive and educational kiai which will later become the initial milestone for the creation of Emotional Spiritual Quotient (emotional intelligence) which ultimately leads to the principles of amar ma'ruf nahi munkar and Li-iqomatuddin; (2) In general, the realization of the leadership pattern of the politician's kiai in increasing the emotional intelligence of students in the Nurul Ulum Pemalang Islamic Boarding School can be said to have achieved good results.

Keywords: Leadership, Kiai, Intelligence, Ponpes Nurul Ulum Pemalang.

Pendahuluan

Umat Islam cukup kaya dengan lembaga-lembaga pendidikannya, lembaga yang dimiliki ini adalah termasuk “bank” sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya (Malik, 1980, p. 79). Lembaga pendidikan Islam tersebut salah satu diantaranya adalah pondok pesantren yang secara makro telah berperan menyadarkan komunitas masyarakat untuk mempunyai idealisme, kemampuan intelektual dan perilaku mulia (*al-akhlaq al-karimah*) guna menata dan membangun karakter bangsa yang paripurna, peran pesantren hingga saat

ini masih teruji dengan usahanya didalam membentuk etika moral dalam kehidupannya dan mampu bertahan mengangkat pesantren menjadi sebuah “bengkel” moral spiritual(Suwendi, 1998, p. 115). Dengan segala dinamikanya pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan dakwah Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya terhadap politik diantara para pengasuhnya dan pemerintah(Mas’ud Dkk, 2002, p. 39).

Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamarkasyi Dzofier mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya, meliputi: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai(Bahri, 2003, pp. 17–18). Kelima unsur ciri pondok pesantren tersebut diatas, ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kiai yang berperan sebagai *ikon* penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki. Ditangan seorang kiai pesantren itu berada. Oleh karena itu, kiai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu berjalan bersama. Dan kiai bertindak sebagai koordinator. Dalam kondisinya yang lebih maju kedudukan seorang kiai dalam pondok pesantren tetap sebagai tokoh primernya. Kiai sebagai pemimpin, pemilik, dan guru yang utama dan secara tidak berlebihan kiai adalah raja pesantren. Lebih jauh pengaruh seorang kiai bukan hanya terbatas dalam pesantrennya, ia juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya bahkan terdengar ke seluruh penjuru nusantara(Bahri, 2003, pp. 22–23).

Sosok kiai dalam Islam sangat dihormati dan disegani karena *karomah* dan kharisma serta kekuatan massa yang riil, maka kiai mulai dirangkul dan direkrut menjadi tokoh politik untuk pemenuhan kekuasaan negara, sehingga hal ini berakkses pada keseluruhan dimensi moral serta tingkah laku kiai tersebut yang akhirnya berimbas pada pencitraan kiai dimata santrinya secara mikro dan masyarakat luas secara makro.

Pola kepemimpinan kiai yang bertindak sebagai poros sentral di sebuah pesantren nampak pada upaya manajerialnya untuk menanamkan berbagai nilai dalam meningkatkan kecerdasan emosional santri, maka para kiai dalam memimpin dan menggerakkan pelaksanaan “*Iqomatuddin*” dan memperkuat “*tauhidullah*” juga perlu ditanamkan kesadaran politik islam bagi santrinya. Penanaman rasa kesadaran politik Islam adalah merupakan tuntutan yang penting(Djaelani, 1994, p. 143). Sejalan dengan statemen tersebut Ibnu Taimiyyah berpendapat ummat wajib mendirikan “pemerintahan Islam” artinya “kewajiban untuk mendirikan pemerintah Islam itu berawal karena ajaran agama islam, dan dengan pemeritahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT karena pengabdian kepada Allah itu melalui cara menta’ati Allah dan rasul-Nya ini merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, sebab Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, menegakkan keadilan, melaksanakan hukum *hudud*, menolong orang yang teraniaya, *jihad fisabilillah* (perang), dan itu semua tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pemerintahan Islam yang memiliki kekuasaan dan kekuatan (Taimiyyah, 1967, pp. 200–202). Oleh sebab itu menjadi penting kiranya untuk mengembangkan kualitas individu yang dimiliki oleh

santri, dan melalui potensi kecerdasan emosional ini kemudian diharapkan seorang santri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam.

Meskipun antara EQ dan SQ berbeda namun keduanya memiliki kekuatan yang sama penting untuk bersinergi dalam menyusun metode yang lebih dapat diandalkan dalam menemukan pengetahuan yang benar dan hakiki.

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (IQ). Kecerdasan otak merupakan syarat minimal untuk meraih keberhasilan. Kecerdasan emosi yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi, bukan IQ. Banyak orang yang mempunyai intelektual tinggi akhirnya terpuruk ditengah persaingan kecerdasan emosional sebagai sebuah metode dan konsep yang jelas dan pasti dalam menggerakkan kekosongan batin. Kecerdasan emosional adalah konsep universal yang mampu menghantarkan seseorang pada predikat yang memuaskan bagi dirinya sendiri dan orang lain (Agustin, 2001, p. XX).

Maka dari itu kedudukan santri yang merupakan cikal bakal bagi tegaknya bangsa dan agama harus dididik secara massif dan tidak terbatas hanya dalam bidang *Ilmuddin* saja tetapi juga pengetahuan umum yang relevan. Dengan demikian dalam pondok pesantren dibutuhkan pola kepemimpinan yang konstruktif dari kiainya. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat : 9 (At-Taubah) ayat 122(Mahmud, 1993, p. 29), yang artinya:

“Tidak sepatutnya bagi orang yang mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan beberapa orang untuk memperjuangkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Bagian pertama dari ayat ini menjelaskan keharusan adanya pembagian tugas *mukminin untuk iqomatuddin*. Bagian kedua, mewajibkan adanya *nafar, thoifah* kelompok, lembaga atau jama'ah yang mengkhususkan diri untuk menggali *ilmuddin* supaya *muttaqqih fiddin*. Bagian ketiga yaitu mewajibkan kepada insan yang tafaqquh iqomatuddin dan membangun masyarakatnya masing-masing (Iskandar, n.d., p. 2).

Metode

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang, namun secara metodologis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*)(Suparlan, 1993, p. 19). Sedangkan jenis penelitian ini adalah *penelitian kualitatif naturalistik*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci(Sugiyono, 2004, pp. 6–8).

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memustkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada pewujudan satuan-satuan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana realisasi pola kepemimpinan kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan emosional santri di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang. Subyek penelitian adalah Kiai yang menjadi tokoh sentral di pondok pesantren

Nurul Ulum Pematang. Instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen, karena ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data analisis dan penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor-pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari seluruh proses penelitian (Moleong, 1991, p. 3). Agar dapat diperoleh data yang lengkap dan benar-benar menjelaskan tentang pola kepemimpinan kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan emosional santri di pondok pesantren Nurul Ulum Pematang. Peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang diantaranya adalah data dari lapangan (*field research*) dan data dari kepustakaan (*library research*) (Hadi, 1997, p. 9).

Kajian Teori

Pola Kepemimpinan Kiai Politikus

Setiap lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggannya. Agar dapat melakukan hal tersebut dengan baik, pesantren perlu dukungan system manajemen yang baik. Beberapa ciri system manajemen yang baik adalah adanya pola pikir yang teratur (*administrative thinking*), pelaksanaan kegiatan yang teratur (*administrative behaviour*), penyikapa terhadap tugas-tugas (*administrative attitude*).

Implikasi dari sistem manajemen ini meniscayakan lembaga pesantren menerapkan pola pengasuhan sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan memiliki keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara umum dapat kita lihat pada komponen manajemen pesantren yang meliputi: (1) Kepemimpinan, (2) Pengambilan keputusan, (3) Kaderisasi, (4) Manajemen konflik (Matsuki, n.d., p. 23).

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut, maka terlebih dahulu penulis mengkaji tentang siapakah pemimpin itu (berkaitan dengan apa/siapa pemimpin itu) dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin (berkaitan dengan fungsi kepemimpinan). Dalam hal ini beberapa pakar manajemen seperti Duke (1986: 10) melihat kepemimpinan sebagaimana fenomena Gestalt, yakni keseluruhan yang lebih besar dari pada bagian-bagiannya. Menurut Dubin (1967: 385) kepemimpinan terkait dengan penggunaan wewenang dan pembuatan keputusan. Sementara Fiedler (1967 : 8) lebih melihat pemimpin sebagai individu dalam kelompok yang diberi tugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kelompok yang terkait dengan tugas. Sebagai penguat dalam pandangan ini Stogain (1950 : 4) menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menjadikan suatu aktifitas bermakna, tidak untuk merubah prilaku namun memberi pemahaman kepada pihak lain tentang apa yang mereka lakukan (Matsuki, n.d., p. 25).

Masih terkait dengan pengertian kepemimpinan, kiranya penulis mengemukakan pengertian dari beberapa pendapat ahli, Snindhia menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi prilaku orang-orang agar bekerjasama menuju ke suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama (Sunindhia, 1998, pp. 59–60). Oteng Sutrisno, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha kearah mencapai tujuan-tujuan tertentu (Sutrisno, 1985, p. 257).

Berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu agar berpartisipasi aktif secara sukarela dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa gejala kepemimpinan antara seseorang dengan kelompok yang terbentuk di sekitar kepentingan-kepentingan yang sama dapat bersikap menurut cara yang telah ditentukan bersama pula. Jadi proses kepemimpinan itu merupakan suatu fungsi dari pemimpin, pengikut dan variabel-variabel situasi yang lain. Sedangkan tujuan dari kepemimpinan menurut Imam Munawir adalah agar segala urusan masyarakat dapat berjalan dengan teratur (Sutrisno, 1985, p. 254). Hal ini untuk menjaga keharmonisan hidup yang penuh kedamaian lahir dan batin menuju keselamatan dunia akhirat.

Seperti kita ketahui bahwa kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab dari pada kegiatan, proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap (mental dan fisik) dari pada kelompok orang-orang yang terlibat dalam segala aktivitas, maupun lembaga-lembaga baik lembaga formal maupun nonformal yang terindikasi bahwa masih banyak pemimpin dengan kelicikannya mengaku Islam hanya lantaran mencari dan memperoleh dukungan. Akan tetapi bila dukungan itu telah berhasil maka kembali lagi ajaran Islam diinjak-injak.

Di dalam memahami kepemimpinan perlu diingat bahwa frame yang digunakan tergantung perspektif dari apa yang digunakan, akan tetapi secara general adalah suatu proses yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan seseorang/kelompok supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan kata “Kiai” berarti tua, pernyataan dari panggilan orang Jawa kepada kakeknya “yahi” yang merupakan singkatan dari pada Kiai, dan kepada nenek perempuannya “nyahi”. Tetapi istilah Kiai juga mengandung suatu unsur rasa yang penuh persucian kepada seorang yang tua, sebagaimana kecenderungan itu umum di kalangan orang Jawa. Sehingga Kiai tidak hanya berarti tua (yang kebetulan saja sejalan dengan pengertian “*syekh*” dalam bahasa Arab) tetapi juga kata kiai mengandung arti yang sakral, keramat dan sakti (Madjid, 1997, p. 19). Namun jelasnya kiai yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan gelar lain dari seorang ulama’ yang mempunyai arti seseorang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap.

Adanya Kiai dalam pesantren merupakan hal yang mutlak kalau lembaga tersebut ingin diakui, sebab Kiai merupakan tokoh sentral yang memberikan pengajaran, oleh sebab itu Kiai menjadi salah satu unsur yang dominan dalam sebuah pondok pesantren (Hasbullah, 1999, p. 49). Namun, dibalik keagungannya itu sangatlah tidak mungkin jika tidak mendapat legitimasi/pengakuan penuh dari masyarakat dalam memberikan gelar ke-Kiai-annya, memberikan pengakuan kepadakiai, dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Abu Bakar Aljeh telah menyebutkan beberapa faktor penyebab/syarat untuk menjadikiai, yang diantaranya yaitu: pengetahuannya, kesalehannya, keturunannya, dan jumlah muridnya (khusus untuk seorang Kiai besar). Vreden Berg juga memberikan ketentuan yang hampir sama dengan H. Abu Bakar Aljeh, yakni: keturunan, pengetahuan agama, jumlah murid dan cara dia mengabdikan dirinya pada masyarakat (Dirjen Kelembagaan, 1993, p. 15).

Sosok seorang kiai dalam pondok pesantren merupakan komponen penting yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di dalam lembaganya (Asy’ari, 1996, p. 23),

karena kiai dalam pesantren menduduki fungsi sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka di tangan kiai pesantren itu berada.

Kiai dan pondok pesantren bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Lebih dari itu, sosok kiai bukan hanya sekedar pemimpin pondok pesantren, ia juga berperan sebagai pemilik sekaligus koordinator dari pondok pesantren pula (Ali, 1987, p. 23).

Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kiai mempunyai pengertian sebagai upaya seorang yang 'alim untuk mempengaruhi dan mengarahkan civitas pesantren pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran risalah. Pada prinsipnya implikasi kepemimpinan bagi pesantren mensyaratkan adanya tipe pemimpin dan kepemimpinan yang khas. Misalnya dalam era reformasi sekarang ini, dibutuhkan adanya kepemimpinan yang mampu memberdayakan masyarakat pesantren dengan tanpa mengorbankan ciri khas kredibilitas pengasuh pesantren. Menyimak pemikiran tersebut, dapat kita temukan pemahaman tentang kepemimpinan secara utuh yang terkait dengan pemberdayaan pondok pesantren. Oleh karena itu, pemahaman tentang kepemimpinan di dalam latar pesantren perlu dicarikan kerangka konseptual yang tepat dalam rangka melestarikan dan menciptakan inovasi-inovasi dalam sistem pesantren (Matsuki, n.d., p. 23).

Masalah kepemimpinan kiai, digunakan pendekatan *sosiologis-normatif* dengan harapan pendekatan tersebut maka aspek-aspek yang melekat pada konstelasi kepemimpinan kiai terhadap santrinya bisa dikaji secara komprehensif.

Kiai adalah sosok manusia biasa, walaupun mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagai pemimpin, namun sifat-sifat manusia yang salah dan benar sekaligus juga tetap melekat pada dirinya. Dalam hal ini Allah telah memberikan etika agama agar dijadikan sebagai sumber nilai oleh kiai kalau benar-benar menjalankan mekanisme kepemimpinannya sesuai dengan etika agama, maka sudah barang pasti akan dapat membawa implikasi positif bagi pesantren khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Secara sosial-politik kiai wajib memerankan dirinya sebagai pelindung umat yang sesuai dengan ajaran normatif dan menjadi kewajiban moral yang telah dipahami oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilakukannya, dan bukan malah menciptakan kesulitan (Asy'ari, 1996, p. 35).

Macam-macam Kepemimpinan Kiai

Sangatlah sulit untuk merumuskan daftar tipe pribadi secara detail yang dimiliki oleh seorang kiai (baca manajer) yang sesuai dengan segala pekerjaan setiap pesantren serta lingkungan pesantren. Sulit pula untuk diilustrasikan suatu pemjumlahan dan *masterertralis* seorang kiai yang berlaku untuk segala kondisi. Gaya kepemimpinan yang menyebabkan ia di pilih sebagai manajer/Kiai sangat berhubungan erat dengan rumusan tujuan pesantren, jenis aktifitas yang harus dipimpin, karakteristik para bawahan, motif usaha, serta kondisi lain yang akan berdampak pada pesantren.

Para tokoh sebagai pengembang ilmu manajemen mengemukakan tipe-tipe pemimpin yaitu: (1) Kepemimpinan pribadi (personal leadership), pemimpin tipe ini melaksanakan tindakannya selalu dilakukan dengan cara kontrak pribadi. Intruksi di sampaikan secara

oral ataupun langsung pribadi disampaikan oleh orang yang bersangkutan (Rasyid, 1998, pp. 310–311); (2) Kepemimpinan non pribadi (*non personal leadership*), adalah segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada pesantren melalui bawahannya atau menggunakan media non pribadi baik rencana, maupun intruksi. Pada tipe ini program pendelegasian kekuasaan sangatlah berperan dan harus di aplikasikan (Rasyid, 1998, p. 311); (3) Kepemimpinan otoriter (*authoritarian leadership*), Pemimpin memusatkan kekuasaan dan keputusan-keputusan pada diri pemimpin sendiri. Pemimpin memegang wewenang sepenuhnya dan memikul tanggung jawab sendiri. Para bawahan hanya diberi informasi secukupnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin (Siswanto, 2005, pp. 158–159); (4) Kepemimpinan demokratis (*demokrative leadership*), pemimpin mendelegasikan wewenangnya secara luas. Pembuatan keputusan-keputusan selalu dirundingkan dengan bawahan, sehingga pemimpin dan bawahan bekerja sebagai suatu tim. Pemimpin memberi informasi sebanyak-banyaknya kepada bawahan tentang tugas dan pekerjaan mereka (Wrong (ed), 2003, p. 163); (5) Kepemimpinan pseudo demokratis, tipe menampakkan dua wajah, seolah yang dia tetapkan adalah demokratis, akan tetapi yang dikerjakan adalah kepemimpinan otoriter atau autokratik. Tipe kepemimpinan ini para anggota diajak untuk menetapkan *policy* yang telah dibuat oleh bersama dan seolah-olah *policy* itu milik bersama, padahal pelaksanaannya pemimpin yang dijadikan pegangan pelaksanaan tugas. Sehingga terjadi manipulasi demokratis atau demokrasi semu (Soetopo, 1982, p. 284); (6) Kepemimpinan paternalistik (*indigensus leadership*), tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari kelompok informal yang di dapatkan dari pelatihan meskipun tidak langsung. Adanya sistem persaingan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang seru dari kelompok yang bersangkutan. Biasanya akan muncul pemimpin yang memiliki klemahan di antara mereka yang ada dalam kelompok tersebut menurut keahliannya dimana dia terlibat di dalamnya.

Hubungan Kiai dan Politik

Gambaran secara umum hubungan antara kiai dan politik adalah *ambivalence* dengan hubungan antara Islam dan negara. Kiai merupakan simbol dari Islam dan politik adalah bingkai dari kemasakan negara. Mengenai hal tersebut di sepanjang jaman memang selalu menuai kontroversi, dikarenakan terdapat perbedaan *background* paradigma masing-masing pelaku politik dan bahkan dapat menimbulkan problem politik yang berkelanjutan.

Kenapa umat Islam sampai berlarut-larut dalam menghadapi problem politik ini? Penyebabnya adalah: (1) *Nash* al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan rujukan utama ajaran umat Islam tidak mengungkapkan secara eksplisit sistem pemerintahan/ketatanegaraan secara tegas dan rinci (Ma'araif, 1996, p. 188). Al-Qur'an tidak meyakini bahwa otoritas politik dapat membentuk dan menguasai nurani manusia (Khan, n.d., p. 3). Karenanya dalam Islam sangat perlu mempertimbangkan aspek-aspek lokal, kontekstual dan temporal (Effendy, 2001, p. 18); (2) Islam telah berjalan sesuai dengan sejarah umatnya dalam empat belas abad lebih namun belum ada konsep yang jelas tentang sistem politik yang berimbas pada munculnya beragam teori dan praktek sistem Islam; (3) Terkait dengan kesulitan pertama dan kedua, sejarah umat Islam mengenai konsep politik diawali dengan justifikasi teologis tentang perbedaan konsep-konsep politik Khawarij, Syi'ah dan Sunni (Sadzali, 1990, pp. 1–2). Bangunan politik Khawarij di dasarkan atas "*lahukma illa lillah*", tidak ada hukum

kecuali dari Allah. Dan kelompok ini sangat ekstrim hingga mengatakan bahwa kelompok dari luar adalah kafir dan sah untuk di bunuh karena tidak menjalankan hukum Allah. Sementara bangunan politik dari Syi'ah di dasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam kerangka kepemimpinan bernegara perlu ada *Wilayah* (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan), dan *Ismah* (kesucian dari dosa yang hanya dimiliki oleh keturunan nabi sebagai pengganti syah kepala negara). Sedangkan bangunan politik Sunni (aliran teologis yang muncul di era Abbasiyah) tidak berbeda jauh dengan peristiwa yang terjadi di masa terpilihnya Abu Bakar. Sekte-sekte tersebut dalam perjalanannya beubah menjadi aliran-aliran keagamaan (teologis).

Pengaruh ini mekuat di era kekhalifahan Bani Umayyah maupun Bani Abasyiah, walau dengan perubahan sedikit seiring dengan ekspansi Islam yang sampai ke Andalusia di ujung barat atau ke India di ujung timur. Dari sini, perbedaan konsepsi politik Islam bisa di mengerti karena ia memang merupakan urusan yang sifatnya *ijtihadi* (penalaran manusia).

Di era modern sekarang ini, secara umum terdapat tiga aliran hubungan Islam dan politik, yaitu: (1) Aliran Islamis, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap termasuk sistem kenegaraan, maka dari itu aliran ini berpendapat bahwa antara Islam dan negara harus disatukan secara formal. (2) Aliran skularis, aliran ini beranggapan bahwa dalam Islam tidak terdapat hubungan sama sekali dengan negara, maka hubungan antara Islam dan negara haruslah dipisahkan. (3) Aliran rekonstruksionis, aliran ini menolak pendapat bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan, karena Islam adalah suatu agama yang lengkap, tetapi aliran ini juga menolak pendapat yang mengatakan antara agama dan negara harus di pisahkan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan tapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Perbedaan antara pendukung Islamis dan Sekularisme sangat tajam. Di berbagai negara Islam baik di Timur Tengah, Asia selatan, Asia Tenggara, Afrika Utara dan sebagainya (Sadzali, 1990, pp. 15–16).

Uraian di atas merupakan gambaran secara umum tentang pergolakan hubungan antara Islam dan politik. Lebih lanjut terkait dengan penelitian ini penulis menelaah hubungan antara kiai dan politik selama ini ternyata diwarnai oleh watak pemikiran muslim yang *antitesis sekularisme*. Sulit untuk membedakan kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan spiritual dengan kehidupan temporal, oleh karena dua bentuk kehidupan itu merupakan di sisi pada mata uang yang sama (*two sides of the same coin*). Keseluruhan dimensi pemikiran seorang muslim itu berpusat pada Tuhan (*theosenrtik*) bertumpu pada prinsip *tauhid* (prinsip keesaan Allah) (Azis, 2000, pp. 56–62).

Sebagaimana semua agama yang datang sebelumnya, Islam juga tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara yang memberikan perlindungan dan pengikut setia yang menyebarkan ajarannya. Inilah pijakan penulis dalam menarik kesimpulan bahwa semua agama dan dunia secara integral.

Secara tegas dapat dikatakan, Islam adalah agama dan negara, sebuah agama yang menjadi aturan hukum dan inspirasi (Azis, 2000, p. 62). Dari asumsi tersebut jelaslah kiranya bahwa keterkaitan antara Kiai dan politik erat sekali, ini terlihat dari profil seorang Kiai yang mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan di bidang agama (baca Islam) sehingga dari

kenyataan tersebut kiai sangat di dengar dan diperhatikan oleh masyarakat. Nasihat dan petunjuknya tidak boleh dilanggar, oleh karenanya para Kiai dituntut untuk memperluas wawasannya yang tidak hanya terbatas pada masalah agama, tetapi juga di tuntutan untuk memahami persoalan politik, ekonomi dan sebagainya (Horikoshi, 1987, p. 234).

Oleh karena pengaruh Kiai-Kiai tertentu yang cukup besar di masyarakat dengan suara dan perintah-perintahnya didengar dan di patuhi secara konsisten, menempatkan mereka sebagai kelompok “elite” baik di tingkat nasional maupun di daerah. Hal ini membuat pemerintah mau tidak mau harus menghargai para Kiai itu dan melibatkannya dalam sektor-sektor tertentu di dalam pemerintahan, apalagi Kiai-Kiai yang dikenal “vokal” di dalam berbicara. Sejak Indonesia merdeka sebagian mereka di angkat menjadi anggota di lembaga legislatif, dan menjadi duta-duta besar terlepas dari pengangkatan ini (Horikoshi, 1987, p. 237).

Maka dari itu telah jelas kiranya jika antara kiai dan politik merupakan satu kesatuan yang membangun agama dan negara. Secara sederhana penulis mengatakan bahwa dalam Pondok Pesantren Darussalam terdapat nilai plus tersendiri dikarenakan adanya tanggung jawab berat yang di emban oleh pemimpin pondok pesantren itu sendiri. Dan bukan menjadi hal yang tabu jika sebagian penguasa muslim yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya di atas ketentuan hukum dan etika syari’at. Akibatnya mereka menetapkan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Semua ini dilakukan karena mereka tidak memahami fleksibilitas *syariat* Islam dan terpengaruh oleh orang-orang barat sekuler. Mereka mau memisahkan komunitas muslim dari agamanya dan menafikan keberadaannya. Apabila pandangan sekuler ini berkembang juga di kalangan selain penguasa muslim mungkin saja hal itu disebabkan keteledoran para ulama’ dalam menjalankan fungsi dakwahnya. Disinilah peran kiai politikus dipertaruhkan, akankah dia tetap konsisten dengan tujuan risalah untuk menegakkan *Daulah Islamiyyah* atau akankah tergiur dengan tawaran-tawaran ego yang menghalalkan segala cara demi berjayanya unsur privasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kiai Politik

Catatan sejarah nampaknya juga telah menorehkan serentetan peristiwa yang terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan intim antara kiai dan politik. Berikut ini diungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: (1) Keluarga, masyarakat di seluruh dunia menobatkan keluarga dalam arti yang sakral dan mendasarkan hubungan interpersonal lainnya, termasuk kewajiban masyarakat dan politik, dalam modelnya keluarga merupakan sebuah satuan primer bagi ketaatan moral sebagaimana sebuah tempat bagi pendidikan sekuler dan agama yang berpengaruh, dan penyampaian pengetahuan agama dan keduniaan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hardace 1993 : 129-140) (Elman & Piscatori, 1998, p. 100). UUD Iran 1979 membuat peran politis keluarga tersurat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa keluarga adalah “Unit fundamental bagi masyarakat Islam” (Iran 1980: 190). Di banyak masyarakat, frase-frase seperti “bapak bangsa” atau “saudara tua” menunjukkan beberapa perumpamaan keluarga menembus kehidupan politik dan digunakan untuk melegitimasi pemimpin-pemimpin politik individu dan diperluas menjadi institusi-institusi politik yang dengannya mereka diidentifikasi. (Schartzberg, 1988 : 71-73) (Elman & Piscatori, 1998, p. 101).

Seperti halnya seorang kiai yang notabene adalah panutan bagi umat Islam dan memiliki banyak penganut dalam setiap aksinya. Bahkan bukan bermaksud untuk melebihi posisi seorang Kiai layaknya “raja” akibat dari pengaruh dan kekuasaannya. Antara Kiai dan pengikutnya layaknya antara bapak dan anak-anaknya, posisi Kiai menjadi tetua itu sudah merupakan tradisi dari dulu hingga sekarang. Hal tersebut terbukti dengan adanya hubungan ketergantungan antara kiai dan orang-orang Islam sebagai pengikutnya untuk pembinaan keluarga. Rasa kepercayaan antara keluarga kiai dan pengikutnya biasanya di ekspresikan melalui pertukaran hadiah dan pelayanan, ini jelas terlihat di lingkungan pedesaan. Kemudian ibadah hari lebaran yang dirayakan sekali setahun nampaknya menjadi kesempatan formal di mana kesetiaan para pengikutnya terhadap kiai secara simbolis di ekspresikan, ikatan antara pemimpin dan pengikut di damaikan kembali dan masyarakat disatukan ke dalam kelompok yang luas (Horikoshi, 1987, pp. 179–186). Eranya tali kekeluargaan antara Kiai dan pengikutnya nampak lebih jelas lagi pada momen-momen politik, seperti pemilu. Petunjuk Kiai untuk memilih partai tertentu sangat memungkinkan untuk meraih kemenangan. Tidak heran mengapa berbagai pihak kontestan pemilu berlomba-lomba mendekati para Kiai jauh-jauh hari sebelum pemilu untuk bergabung dengan mereka dalam pesta demokrasi itu. Ada yang melakukan kunjungan ke beberapa pesantren besar dan berpengaruh sambil membawa “bingkisan” untuk pesantren dan santrinya (Elman & Piscatori, 1998, pp. 104–105). (2) Perkawinan, perkawinan menjadi sebuah cara untuk mengasosiasikan dan mengatur konflik dan persaingan ekonomi dan politik dalam masyarakat yang lebih luas (N. Tapper 1991 : XV, 91-93). Sejarah menjelaskan bahwa dalam pemerintahan sesaat sebelum revolusi Islam, seluruh tujuh “sumber-sumber panutan” memiliki hubungan keluarga yang sama. Beberapa keluarga yang berkeagamaan kunci telah melakukan perkawinan campur dengan elite-elite politik dan ekonomi, termasuk bazari, militer dan para profesional (Fischer, 1980: 88-97). Dampak dari terjalannya jaringan-jaringan keluarga ini digunakan untuk menyatukan dan mengembangkan pengaruh politik. Lebih lanjut tentang “sumber-sumber panutan” tersebut di atas di antaranya adalah terdiri dari keluarga-keluarga ulama/ Kiai, keluarga-keluarga dari petugas agama yang lebih tinggi dan seterusnya (Horikoshi, 1987, p. 232,236); (3) Kharismatik, sebagaimana yang telah di amati oleh Weber, tokoh kharismatik seperti Kiai harus selalu di kagumi oleh pengikutnya. Sehingga kiai mampu menduduki posisi sentral dalam mensyaratkan Islam dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif jika diperlukan. Bahkan masyarakat telah mengabsahkan kiai sebagai pemimpin dan juru bicara mereka dalam hubungannya dengan sistem nasional.

Status yang tinggi itu tak tergoyahkan di hadapan para pejabat pemerintah. Hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kiai untuk kepentingan masyarakat. Prestasi kiai semasa perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda selama revolusi ditambah dengan penghormatan masyarakat atas keahliannya di bidang agama dan ketaatan masyarakat kepada pemerintah-perintahnya menyebabkan para pejabat pemerintah segan mempersulit kiai (HMI, 2003, p. 123).

Dengan alasan tersebut di atas yang menyebabkan betapa dekatnya seorang kiai itu dengan kondisi perpolitikan serta dengan pengaruh kharismanya diharapkan mampu membawa aspirasi masyarakat yang senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran,

menentang kezaliman dan tirani, membela para *dlu'afa*, *fuqara'* dan *masakin* yang tertindas dan teraniaya.

Kecerdasan Emosional

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kecerdasan emosional (*emotional spiritual quotient*) merupakan hasil kolaborasi dari EQ (*emotional Qoutient*) dan SQ (*spiritual Qoutient*). Maka pada pertengahan 1990-an, Daniel Goleman mempopulerkan penelitian dari banyak nuerolog dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecedasan emosional, yang di singkat dengan EQ, sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. EQ memberikan kesadaran mengenai perasaan milik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain. EQ memberikan kita rasa empati, cinta, motivasi dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Sebagaimana di nyatakan Goleman, EQ merupakan prsyarat dasar untuk menggunakan IQ seara efektif. Jika bagian-bagian otak untuk “movasra” telah rusak, kita tidak dapat berfikir efektif (Zohar & Marshall, 2002, p. 12). Pun dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh yang menunjukkan tidak sedikit orang dengan kemampuan intelektual luar biasa namun gagal karena rendahnya kecerdasan emosi yang di miliki.

Pada dasarnya pola pikir IQ, mengindikasikan dominasi rasionalitas. Rasionalitas dapat berbenturan dengan nilai-nilai tradisi yang emisional termasuk nilai-nilai agama. Rasionalitas juga mengimplikasikan dominasi rasio atau nalar dalam kehidupan. Dominasi rasio ini menyebabkan melemahnya kehidupan beragama, sebagaimana dapat di lihat dari perkembangan sekularisme di dunia barat yang menyisihkan agama dari kehidupan bernegara. Setelah perang dunia ke-2, terutama sejak tahun 1970-an banyak pemikir darat menyadari akibat-akibat negatif dari dominasi rasio itu (Tampubolon, 2001, p. 15). Baumer (1977) misalnya, mengatakan telah terjadi dekadensi dlam kebudayaan barat, yang antara lain di tandai oleh semakin jauhnya individu dan masyarakat dari agama (Maksum & Ruhendi, 2004, p. 196). Dominasi rasio berkembang pesat melalui pendidikan di Indonesia. Selama ini pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi yang terlalu menekankan pada aspek akademik, kecerdasan otak/IQ.

Salah satu perbedaan dasar antara masyarakat barat dan timur ialah bahwa masyarakat barat cenderung mendengarkan “kata kepala”, sedangkan masyarakat timur lebih lebih mendengarkan “kata hati”. Mulai 1980-an anggapan tersebut tampaknya berubah. Harvey Cox (1984), mengatakan “*religion return to secular city*” (agama kembali bangkit dalam masyarakat sekuler). Kemudian Naisbit (1990) misalnya, meramalkan agama dalam milenium ketiga. Lebih penting lagi adalah penemuan Kecerdasan Emosional (EQ) dalam psikologi, yang sebelumnya tidak di sadari (Maksum & Ruhendi, 2004, p. 197).

Jika anak mampu menahan amarah dan kesalahannya, masih dalam batas kata-kata dan sikap “argumentatif” tentunya hal itu sesungguhnya menandakan kematangan jiwanya. Sedangkan kecerdasan emosi itu sendiri dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut: (1) Kesadaran diri (*self awareness*), (2) Pengaturan diri (*self regulation*), (3) Menangani Motivasi (*motivation*) (4) Empati (*empaty*), (5) Ketrampilan sosial (*social skill*) Yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang

Pembahasan

Pola Kepemimpinan Kiai Politikus di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalang

Kiai politikus dalam melaksanakan kepemimpinannya di pondok pesantren pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kiai yang tidak bergelar politikus, hal ini terlihat dari kepemimpinannya yang optimal yang dituangkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan *emotional* maupun *spiritual* dari pada santri.

Sebagaimana diketahui bahwa kiai yang paling pokok adalah mengajar dan mendidik, keduanya adalah suatu kesatuan yang tidak boleh di pisahkan. Oleh karena itu, yang menjadi sorotan utama dari sosok kiai adalah kemampuan memimpin dalam mengajar dan mendidik.

Mengajar sebagai salah satu bentuk kepemimpinan kiai merupakan kegiatan dalam mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada santri sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah nabi. Aspek dominan yang di kembangkan dalam mengajar adalah bagaimana aspek *emotional* dan *spiritual* santri dapat terwujud.

Dalam tugasnya, terkadang kiai mempercayakan pada Ustadz pilihan atau pada seorang atau beberapa orang santri yang benar-benar sesuai untuk posisi sebagai ustadz, namun Kiai bukan langsung lepas tangan, akan tetapi Kiai juga mengambil peran dalam kegiatan mengajar *face to face* dengan santri.

Kiai selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dalam kepemimpinannya telah menentukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin baik itu berhubungan dengan aktifitas internal pesantren maupun kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas eksternal pesantren atau kegiatan yang berhubungan masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan adalah sesuai dengan ciri khas pesantren pada umumnya, yaitu ; mengintegrasikan antara pendekatan, metode dan tehnik pembelajaran serta mampu memotivasi santri untuk mau belajar.

Realisasi kepemimpinan yang lainnya adalah mendidik, karena mendidik merupakan kegiatan kiai dalam memberikan contoh, tuntunan, petunjuk, dan keteladanan yang dapat di terapkan atau di tiru dalam sikap dan perilaku yang baik (*akhlakul karimah*). Untuk itu, kiai harus mengetahui apa yang telah menjadi fungsi dan kewajibannya, yang antara lain: (1) memimpin dan menggerakkan pelaksanaan "*Iqomatudin*". Dalam hal ini Kiai menyelenggarakan pembinaan dan pembentukan kader penerus perjuangan "*Iqomatuddin*"; (2) Membina persatuan dan kesatuan dalam menunaikan tugas-tugas/kewajiban "*Iqomatudin*". melaksanakan pengakajian Islam dan pengembangannya. Ini diartikan dengan menggali ajaran al-Qur'an dan sunnah, menemukan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang islami untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa kiai memiliki tugas sebagai pengajar dan pendidik. Akan tetapi, untuk menganalisis bagaimana realisasi pola kepemimpinan kiai politikus di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang secara *kaffah* dan *komprehensif* maka perlu di ukur dengan berbagai ciri dan indikator sebagai berikut: (1) Kepemimpinan kiai yang bersifat transformasional, dalam hal ini Kiai memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi dan para santri pada gilirannya akan "mengontrol" kiai dengan menempatkan kiai sebagai panutan dan rujukan. berdasarkan data yang telah terkumpul dijelaskan bahwa tugas kiai politikus di

pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dalam memotivasi, mengubah, menggerakkan dan mengarahkan santrinya ke tingkat intelektual dan spiritual yang lebih tinggi dapat dikatakan telah memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rutinitas kegiatan pondok pesantren yang antara lain: pengajian kitab, shalat berjamaah, musyawarah dan diskusi, latihan pidato/*tabligh*, dan baca *al-Barjanji ad-diba'/burdah*; (2) Kepemimpinan kiai yang responsive, kepemimpinan ini berpegang pada prinsip bahwa pesantren merupakan lembaga untuk memberikan pelayanan kepada komunitas pesantren (santri, walisantri dan Ustadz) serta masyarakat luas dan pesantren selalu terbuka dan ikhlas untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat untuk kemajuan pesantren itu sendiri.

Kepemimpinan yang responsif di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dapat dikatakan telah memuaskan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan kebaktian yaitu: kerja bakti di lingkungan pondok dan lingkungan masyarakat sekitar, mengumpulkan dan menerina zakat qurban yang kemudian di bagi-bagikan kembali, mengumpulkan pakaian dan beras untuk fakir miskin, pelatihan seni baca al-Qur'an baik secara tartil maupun dengan lagu; (3) Kepemimpinan kiai yang edukatif, adalah suatu keharusan bahwa pengelolaan pesantren hendaknya memberi keuntungan bagi santri dengan meningkatkan hasil belajar dan kesalehan perilaku mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini jelas diperlukan pendidikan yang seoptimal mungkin. Maka demi ketercapaiannya perlu di tunjang beberapa hal penting yang antara lain; misi dan tujuan, proses belajar mengajar, iklim belajar dan lingkungan yang mendukung.

Kiai selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dalam kepemimpinannya telah mengupayakan peningkatan mutu hasil belajar dan kesalehan perilaku santri sesuai dengan misi dan tujuan pesantren. Upaya tersebut diwujudkan dalam program kegiatan bagi para santri untuk menggali ilmu pengetahuan baik di dalam pondok pesantren, madrasah dan sekolah maupun kejar paket. Maka setidaknya pesantren telah memberikan keuntungan yang positif bagi para santri yang mondok di pondok pesantren Darussalam tersebut. Kemudian, dalam kesehariannya kiai selaku pemimpin pondok pesantren selalu menjaga etika-etika pergaulan, baik pergaulan dengan para santri dan Ustadz maupun pergaulan dengan masyarakat secara umum.

Pola Kepemimpinan Kiai Politikus dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalang.

Jika dilihat dari upaya untuk meningkatkan kecerdasan emosional santri, maka realisasi kepemimpinan kiai politikus di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang nampak terlihat pada pembinaan ummat (santri) menuju kepribadian yang utama dengan mentalitas yang luhur. Hal ini semata-mata bertujuan pada penegakan *Daulah Islamiyyah* yang tentunya akan menjadi tanggung jawab bagi generasi muda Islam. Ini merupakan standar yang lebih signifikan dan detail untuk menimbang kadar kebangkitan ummat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka, Kiai menggunakan jalur tarbiyah yang berorientasi pada pembangkitan potensi kecerdasan emosional santri. *Ending*-nya adalah bagaimana Kiai mampu mewujudkan perilaku yang mulia (akhlakul karimah) pada diri santri.

Lebih lanjut, perihal upaya Kiai politikus untuk meningkatkan kecerdasan emosional santri di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang antar lain: (1) Aqidah, keimanan kepada Allah dan segala

bentuk keimanan dalam Islam merupakan tujuan awal dari penciptaan manusia. Orientasi ketuhanan dalam pendidikan amat penting, oleh sebab itu aspek keimanan ini sangat mendasar dan berpengaruh pada kehidupan manusia jika di kaitkan dengan pendidikan Islam yang intinya adalah mewujudkan manusia-manusia yang memiliki keimanan yang kokoh yaitu Iman yang tidak terbatas hanya pada pengertian dan perkataan, tetapi juga harus di implementasikan dengan praktek-praktek ibadah dan ritualitas agama yang menumbuhkan sikap positif untuk kehidupan pribadi dan masyarakat. Dalam prakteknya Kiai selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang telah mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan aqidah, hal ini di wujudkan dalam bentuk pengkajian al-Qur'an, kitab-kitab salaf (kitab kuning), dzikir malam, shalat dan lain sebagainya. (2) Aqliyyah (pendidikan ilmu dan sains). Islam adalah agama yang menghargai akal dan menempatkannya sebagai dasar pemberian beban hukum (taklit) dan sebagai tolak ukur penentuan balasan baik buruk bagi perbuatannya. Al-Qur'an telah banyak disebutkan mengenai himbauan Ilahi agar manusia menggunakan akal pikiran, pengertian dan analisa.

Hal ini telah diaplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti madrasah, sekolah umum maupun kejar paket, di tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan seperti beternak, pertukangan kecil (membuat kaligrafi, mengukir hiasan dinding dan lain-lain), dan pertanian. (3) Khuluqiyyah (pendidikan kepribadian moral). Akhlak merupakan bagian dari Iman dan keselamatan aqidah serta keikhlasan beribadah yang tergambar pula pada kemantapan akhlaq.

Pesantren secara langsung maupun tidak langsung telah mengajarkan santri untuk selalu ta'at dan tawadhu' kepada orang yang lebih tua dan saling menghormati kepada sesama, ini sebanding lurus dengan sikap suri tauladan yang di tunjukkan oleh Kiai. Dan berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Darussalam Desa Tambak Selo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan benar-benar telah melaksanakan hal tersebut. (4) Jasdiyyah. (5) Tubuh merupakan sarana penting manusia untuk mencapai maksud serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik. Di antara tujuan menyelenggarakan pendidikan jasmani yaitu agar setiap muslim berbadan sehat untuk memelihara keadaan kesehatan mental, jiwa dan pikiran. Kegiatan ini di manifestasikan dalam bentuk kegiatan yang bersifat menyehatkan, kegiatan-kegiatan ini antara lain, pertanian, masak memasak, pertukangan kecil (mengukir hiasan dinding, kaligrafi dan lain-lain). (6) Jihad, pendidikan ini tidak sama dengan pendidikan kemiliteran, karena pengertian jihad dalam hal ini adalah lebih luas darai pada pengertian kemiliteran. Jihad di dalamnya mencakup tentang Iman, akhlak, jiwa, dan pengorbanan disamping disiplin dan latihan pula seperti kemiliteran. Jihad diartikan dalam arti yang luas, untuk tingkatan yang paling tinggi adalah perang pada jalan Allah. Diantara kedua itu adalah jihad lisan, pena, angan, perkataan yang benar di hadapan orang yang dzalim. Bentuk-bentuk kegiatan yang ada di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang pada dasarnya berporos pada satu tujuan yaitu selalu *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap segala hal. (7) *Ijtima'i* (pendidikan sosial). Beramal untuk kebaikan masyarakat merupakan bagian dari misi ini. Hal ini mempunyai tiga jalur utama yaitu, ibadah yang merupakan perwujudan dengan hamba Allah, amal kemanusiaan yang merupakan perwujudan hubungan sesama manusia dan jihad melawan musuh-musuh agama. Kegiatan-kegiatan sosial ini telah terlaksana dengan baik melalui pengumpulan pakaian dan beras untuk di kasihkan kepada fakir miskin, penyembelihan hewan qurban dan lain sebagainya.

(8) Politik, yang di maksud dengan aspek ini adalah segala apa yang berhubungan dengan pemerintahan, tata negara dan hubungan antar pemerintah dengan rakyat. Pendidikan politik ini di dasarkan atas sejumlah prinsip yaitu, memperkuat kesadaran dan wajib membebaskan negeri Islam dari setiap kekuasaan asing dan mengusir penjajah dari negeri Islam dengan segala cara yang syah, membangkitkan kesadaran dan perasaan atas wajibnya mendirikan pemerintahan Islam, membangkitkan kesadaran dan perasaan akan wajibnya untuk mewujudkan persatuan Islam.

Kiai selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang mempunyai fungsi ganda, selain sebagai imam pondok Kiai juga memposisikan dirinya sebagai negarawan. Dalam hal ini Kiai terkadang melibatkan santri untuk ikut mendampingi manakala ada acara-acara yang bersifat kenegaraan maupun politik. Dari sini santri secara tidak langsung akan mampu menangkap dan merespon apa-apa yang telah didapatkannya kemudian memfilternya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu sikap.

Berdasarkan pada hal-hal yang tersebut di atas maka dapat diamabil kesimpulan bahwa realisasi pola kepemimpinan Kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan emosional santri di pondok pesantren Nurul Ulum Pemalang secara umum dapat di kategorikan baik atau dengan kata lain sudah sangat optimal. Hal ini tercermin pada aspek-aspek akhlakul karimah yang merupakan manifesasi dari kecakapan kecerdasan emosional yang memiliki kedudukan tinggi, karena akhlakul karimah merupakan pilar terpenting yang menyangga pondasi *syari'ah*, *tarbiyah* dan penyiapan aqidah Islam yang kelengkapan kandungannya dimaksudkan untuk menyempurnakan akhlak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pastinya ada beberapa kekurangan yang mungkin saja terlihat, akan tetapi itu sangat manusiawi dan wajar, tergantung dari sudut pandang mana seseorang itu melihatnya dan atas latar belakang pemikiran apa seseorang itu berpendapat.

Simpulan

Sebagai seorang pemimpin pondok pesantren dan sekaligus sebagai tokoh politikus, maka kiai harus memahami betul siapakah dirinya, bagaimana melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memenuhi berbagai kriteria yang menunjukkan kharismanya sebagai seorang pemimpin. Hal ini ditandai dengan ciri kiai yang bersifat transformasional, responsif dan edukatif yang nantinya akan menjadi tonggak awal bagi terciptanya *Emotional Spiritual Quotient* (kecerdasan emosional) yang akhirnya bermuara pada pada asas *amar ma'ruf nahi munkar* dan *Li-iqomatuddin*.

Secara umum realisasi dari pola kepemimpinan kiai politikus dalam meningkatkan kecerdasan emosional santri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Pemalang dapat dikatakan telah mencapai hasil yang optimal/baik, hal ini tercermin pada program-program yang telah dilaksanakan oleh pondok pesantren dan dapat menjadi upaya untuk menanamkan kebangkitan Islam, menegakkan nilai-nilai Islam dan yang lebih penting adalah memberikan benteng moral pada santri dengan jalan membangun *aqidah*, *aqliyah*, *khuluqiyah*, *jasdiyah*, *jihad*, *Ijtima'* dan politik yang bertujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan *Emotional Spiritual Quotient* (kecerdasan emosional) yang ada di setiap pribadi santri.

Daftar Pustaka

- Agustin, A. G. (2001). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Jakarta: Arga.
- Ali, A. M. (1987). *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali.
- Asy'ari, Z. H. (1996). *Moralitas Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKPSM.
- Azis, A. G. (2000). *Berpolitik Untuk Ulama', Misi Islam, Kristen Dan Yahudi Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, G. (2003). *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti.
- Dirjen Kelembagaan, A. I. (1993). *Pola Pembelajaran Di Pesantren*. Jakarta: Depag RI.
- Djaelani, A. Q. (1994). *Peran Ulama' dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Effendy, B. (2001). *Teologi Baru Politik Islam*. Yogyakarta: Galang Press.
- Elman, D. F. E., & Piscatori, J. (1998). *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan Dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hadi, S. (1997). *Metodologi Reserarch Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hasbullah. (1999). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HMI, C. B. (2003). *Intelektual Profetik Kerakyatan, Visi Baru HMI*. Yogyakarta: Creative Monitory.
- Horikoshi, H. (1987). *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Iskandar, S. (n.d.). *Pokok Pikiran Mengenai Pengembangan Pondok Pesanten*. Bogor: Badan Pelaksana Majelis Pimpinan BKSP Jawa Barat.
- Khan, K. (n.d.). *Tentang Teori Politik Islam*. Bandung: Pustaka.
- Ma'araif, S. (1996). *Islam Dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren ; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramasina.
- Mahmud, M. (1993). *Tafsir Wadhihalmujallad Tsani*. Beirut: Lidarjil.
- Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). *Paradigma Pendidikan Universal : Di Era Modern Dan Post Modern "Mencari Visi Baru Atas Relaitas Baru" Pendidikan Kita*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Malik, F. (1980). *Visi Pembaharuan Islam*. Jakarta: PL3NI.
- Mas'ud Dkk, A. (2002). *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matsuki, H. dkk. (n.d.). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Moleong, L. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, D. (1998). *Islam Dan Berbagai Dimensi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sadzali, M. (1990). *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetopo, H. (1982). *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.

- Sunindhia, Y. . (1998). *Kepemimpinan Dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suparlan, P. (1993). Pengantar Metodologi Penelitian : Pendekatan Kualitatif. *Majalah Media*.
- Sutrisno, O. (1985). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Suwendi. (1998). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam.
- Taimiyyah, T. I. (1967). *Pokok Pedoman Dalam Bernegara*. Bandung: Diponegoro.
- Tampubolon, D. P. (2001). *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Kecerdasan-21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wrong (ed), D. (2003). *Sebuah Hasanah Perpustakaan RI*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2002). *SQ ; Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka.

This page intentionally left blank